

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut KNKG (2012) risiko adalah dampak dari ketidakpastian terhadap sasaran. Dengan kata lain, risiko perusahaan adalah keadaan ketika ketidakpastian di masa mendatang terjadi dan menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu kasus yang menyangkut isu risiko perusahaan adalah kasus yang terjadi pada tahun 2018 menyangkut PT Garuda Indonesia Tbk. Inti dari kasus ini adalah adanya gugatan salah satu penumpang maskapai Garuda Indonesia yang menuntut dengan jumlah sebesar Rp 11,25 miliar (*merdeka.com*). Kasus ini berkaitan dengan risiko operasional pada PT Garuda Indonesia Tbk, yang artinya ada kegagalan perusahaan dalam menjalankan fungsi pengendalian internalnya. Risiko operasional lebih mengarah pada kegagalan yang tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan operasional sehari-hari perusahaan. Kegagalan bisa terjadi karena berbagai faktor, misalnya kegagalan teknis, kesalahan perseorangan (karyawan), dan faktor lain yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan operasional perusahaan (Utami, 2020).

Pada kasus ini, kesalahan disebabkan oleh kesalahan manusia, yakni pramugari Garuda Indonesia yang lalai hingga menumpahkan air panas ke salah satu penumpang maskapai dengan nomor penerbangan GA-264. Penumpang tersebut ketumpahan teh panas saat pramugari memberikan dua gelas teh panas

padanya (*meal and beverage serving*). Air panas tersebut menumpahi dada, leher, dan tangan penumpang tersebut hingga melepuh.

Risiko operasional tersebut menyebabkan munculnya risiko lain yang dialami perusahaan, yakni risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko yang terjadi akibat menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar (*id.wikipedia.org*). Risiko pasar yang dialami oleh perusahaan yaitu adanya penurunan harga saham Garuda Indonesia (GIAA) yang mencapai Rp 296 per lembar saham pada bulan Maret 2018, dan harga ini turun sekitar 7,5% dari harga saham sebelumnya (*kompasiana.com*).

Dari kasus di atas menunjukkan bahwa suatu risiko bisa menyebabkan risiko lainnya muncul, sehingga pemantauan dan pengelolaan risiko memang harus dilakukan oleh setiap perusahaan. Dengan manajemen risiko perusahaan diharapkan bisa mengelola berbagai risiko dan memperkecil kemungkinan kerugian yang akan dialami perusahaan.

Salah satu faktor yang berpotensi membuat bangkrut suatu perusahaan adalah ketidakefektifan perusahaan dalam mengelola risiko (*finance.detik.com*). Perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan apabila mereka tidak bisa mengelola risiko yang mereka hadapi. Hal tersebut menyebabkan perusahaan-perusahaan berinisiatif untuk memperbaiki tata kelola mereka masing-masing. Salah satu caranya adalah dengan pengelolaan risiko yang lebih signifikan dan nyata yang dijalankan oleh manajemen risiko.

Tata kelola perusahaan yang baik sangatlah penting, terutama bagi perusahaan publik, sebab para investor tidak ingin uang mereka tidak kembali

(Constanty, 2019). Pentingnya tata kelola perusahaan yang baik bisa kita lihat dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) yang mendukung prinsip dasar Good Corporate Governance (GCG) untuk diterapkan oleh para pelaku pasar (Constanty, 2019). Risiko dan prospek emiten pada masa mendatang bisa lebih diperkirakan dengan penerapan *good corporate governance* (GCG). Para pemodal jangka panjang cenderung mencermati penerapan GCG pada setiap emiten, itulah sebabnya tata kelola perusahaan yang baik itu perlu diterapkan.

Salah satu kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah membentuk Komite Pemantau Risiko atau bisa kita sebut Komite Manajemen Risiko, yang tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang telah disusun oleh direksi (crmsindonesia.org). Lalu, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, entitas utama wajib membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi yang efektif dan komprehensif. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Konglomerasi Keuangan adalah LJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas hubungan karakteristik dewan dan karakteristik perusahaan terhadap pembentukan Komite Manajemen Risiko. Utomo (2012) menemukan bahwa komisaris independen, jenis industri, ukuran perusahaan, reputasi auditor, dan konsentrasi kepemilikan mempengaruhi pembentukan RMC. Ratnawati (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan, komisaris independen, dan risiko pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pembentukan RMC. Kusuma (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan frekuensi rapat Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pembentukan RMC. Wahyuni dan Puji (2012) juga menemukan bahwa frekuensi rapat, jumlah anak perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pembentukan RMC.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan RMC. Karakteristik Dewan Komisaris meliputi variabel independensi Dewan Komisaris, intensitas rapat dewan. Karakteristik perusahaan meliputi kompleksitas bisnis, risiko pelaporan keuangan, kepemilikan institusional, dan jenis industri serta variabel reputasi auditor terhadap keberadaan RMC dalam sebuah perusahaan. Penelitian ini menambah dua variabel baru yaitu kepemilikan institusional dan jenis industri. Maka, berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS, KARAKTERISTIK PERUSAHAAN, DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP PEMBENTUKAN *RISK MANAGEMENT COMMITTEE* (RMC).**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah semakin tinggi independensi Dewan Komisaris, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan?
2. Apakah semakin tinggi intensitas rapat Dewan Komisaris, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan?
3. Apakah semakin tinggi kompleksitas bisnis, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan?
4. Apakah semakin tinggi risiko pelaporan keuangan, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan?
5. Apakah semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan?
6. Apakah perusahaan yang beroperasi pada jenis industri keuangan kemungkinan lebih besar membentuk komite manajemen risiko?
7. Apakah perusahaan yang memiliki reputasi auditor lebih baik kemungkinan membentuk komite manajemen risiko?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah semakin tinggi independensi Dewan Komisaris, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah semakin tinggi intensitas rapat Dewan Komisaris, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.
3. Untuk mengetahui apakah semakin tinggi kompleksitas bisnis, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.
4. Untuk mengetahui apakah semakin tinggi risiko pelaporan keuangan, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.
5. Untuk mengetahui apakah semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin tinggi juga kemungkinan pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan.
6. Untuk mengetahui apakah perusahaan yang beroperasi pada jenis industri keuangan kemungkinan lebih besar membentuk komite manajemen risiko.
7. Untuk mengetahui apakah perusahaan yang memiliki reputasi auditor lebih baik kemungkinan membentuk komite manajemen risiko.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas praktik *good corporate governance*, terutama dalam masalah Manajemen Risiko, yaitu bisa dengan membentuk *Risk Management Committee*.

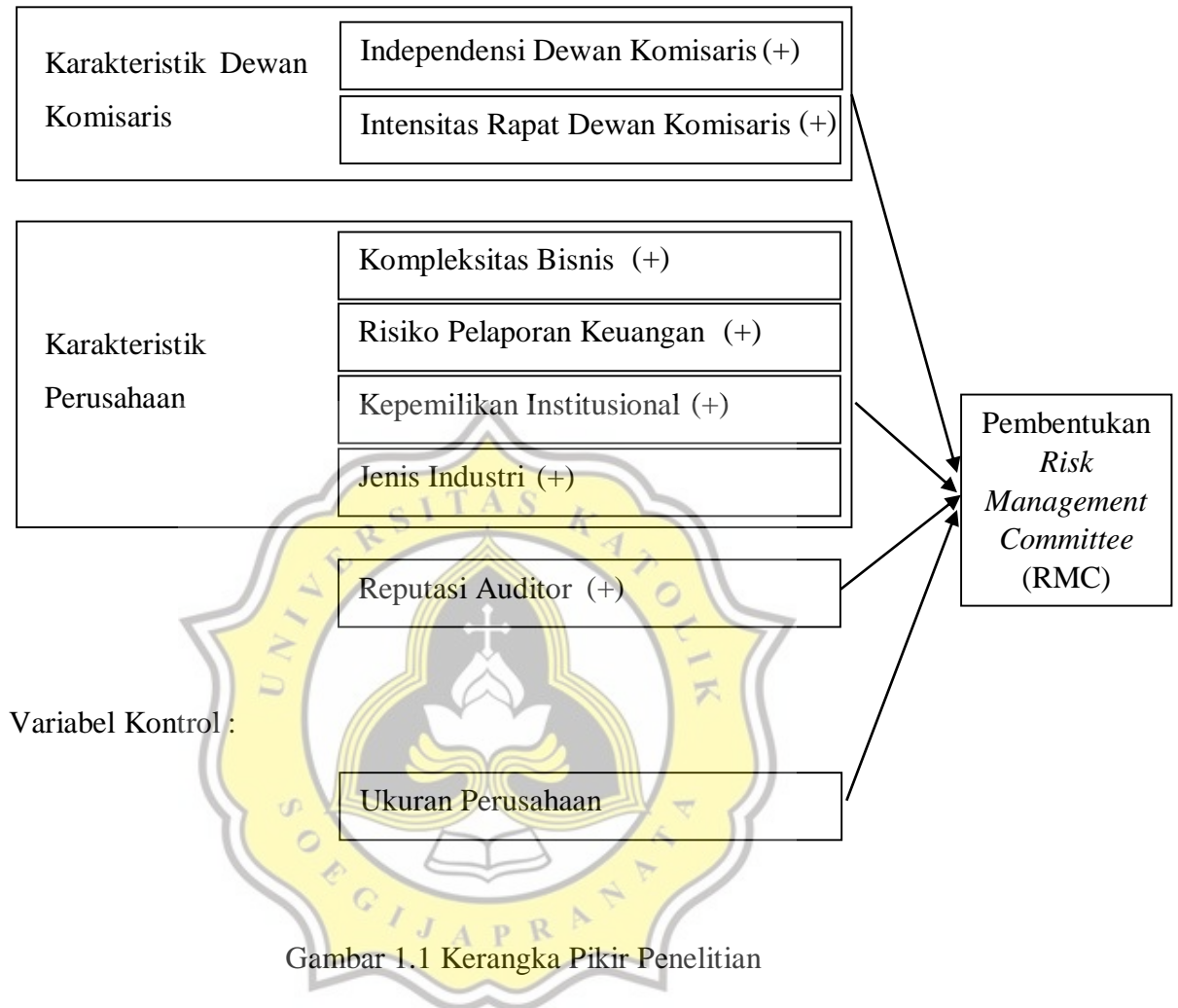
2. Bagi investor dan calon investor

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan arahan untuk mengambil keputusan investasi, yaitu dengan mengevaluasi penerapan Manajemen Risiko yang diterapkan perusahaan.

3. Bagi kalangan akademisi dan praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor pendukung yang mempengaruhi keberadaan *Risk Management Committee*. Diharapkan juga penelitian ini bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Pikir

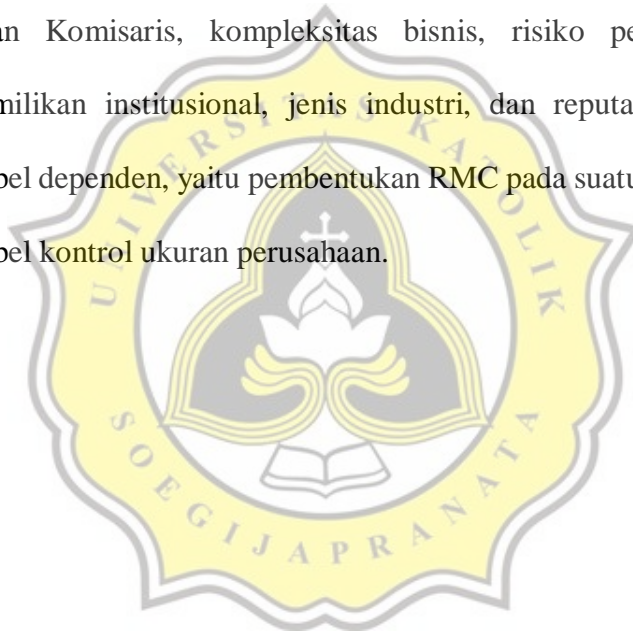


Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian

Sistem Manajemen Risiko berhubungan erat dengan *good corporate governance* sebuah perusahaan. Apabila sebuah perusahaan telah menerapkan dengan efektif sebuah sistem Manajemen Risiko, maka *good corporate governance* mereka juga akan menjadi lebih kuat. Tugas pengawasan Manajemen Risiko ini dijalankan oleh Dewan Komisaris, tujuannya supaya program Manajemen Risiko dapat berjalan efektif (Krus dan Orowitz, 2009 dalam Andarini dan Januarti, 2012). Dalam menjalankan

tugas dan tanggung jawab yang begitu luas, Dewan Komisaris memerlukan bantuan agar meringankan beban mereka, maka dari itu dibentuklah Komite Manajemen Risiko. *Risk Management Committee* (RMC) merupakan sebuah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi pengawasan Manajemen Risiko.

Penelitian ini dibuat dan dilakukan untuk menguji kembali pengaruh variabel independen, yaitu independensi Dewan Komisaris, intensitas rapat Dewan Komisaris, kompleksitas bisnis, risiko pelaporan keuangan, kepemilikan institusional, jenis industri, dan reputasi auditor terhadap variabel dependen, yaitu pembentukan RMC pada suatu perusahaan dengan variabel kontrol ukuran perusahaan.



1.5 Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjabarkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan masalah penelitian, kerangka pikir penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menjabarkan tinjauan pustaka serta pengembangan hipotesis yang akan menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian ini.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjabarkan jenis dan sumber data yang akan peneliti gunakan, definisi operasional, pengukuran variabel, serta metode analisis data.

Bab IV HASIL DAN ANALISIS

Bab ini akan menjabarkan hasil dan analisis data yang akan menguraikan perhitungan-perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada penelitian ini.

Bab V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menjabarkan kesimpulan, keterbatasan, serta implikasi dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.